

DITERBITKAN OLEH
YAYASAN TANAH MERDEKA (YTM)
Jl. Tg. Manimbaya No. 111 B Palu 94113
Sulawesi Tengah Indonesia
Telp/Fax. 0451- 425892
www.ytm.or.id
ytm@ytm.or.id

© 2006

KETIKA PETANI ANGKAT BICARA, DENGAN SUARA DAN MASSA:

Belajar dari Sejarah Gerakan Petani di Indonesia dan Amerika Selatan

Oleh : George Junus Aditjondro

1. GERAKAN KELAS-KELAS TERTINDAS (*subaltern classes*), menurut pemikir dan aktivis radikal Italia, Antonio Gramsci (Sardar & Van Loon 1999: 79) tidak dapat disepelekan, dan tidak dapat dianggap kurang penting dibandingkan dengan gerakan kelas menengah dan gerakan kaum muda terpelajar, yang terlalu dielu-elukan dalam tradisi liberal. Juga tidak dapat disepelekan dibandingkan dengan gerakan kaum buruh, yang selalu menjadi idola kaum Kiri. Dewasa ini, justru sinergi di antara berbagai gerakan kemasyarakatan (*social movements*) yang perlu dilihat dan diperjuangkan, untuk memperkuat dampak politik transformatif gerakan

petani – baik gerakan petani gurem (*peasant movement*) maupun gerakan bangsa-bangsa pribumi (*indigenous peoples movement*).

2. Lihatlah saja dua kasus berikut di Bolivia dan Brazil, Amerika Selatan. Juan Evo Morales Ayma (46), pemimpin *Movimiento al Socialismo* (MAS, Gerakan Menuju Sosialisme), dilantik menjadi Presiden di La Paz, ibukota Bolivia, hari Minggu, 22 Januari lalu. Tulang punggung aliansi MAS, yang didirikan oleh Morales tahun 1995, adalah gerakan petani koka (*cocaleros*). Morales sendiri adalah seorang petani koka yang berasal dari satu di antara empat kelompok etno-linguistik

pribumi, yakni Quechua, Aymara, Guarani dan Chiquitano, yang meliputi 65% penduduk Bolivia. Dengan demikian, Morales, seorang Aymara dan bekas penggembala *llama* yang telah menyaksikan empat saudaranya meninggal karena kemiskinan, telah mematahkan dominasi kulit putih selama 500 tahun di negara di Pegunungan Andes itu. Patut juga dicatat bahwa sejak 2003, gerakan bangsa-bangsa pribumi (*indigenous peoples*) yang dipimpin oleh Morales sudah menjatuhkan dua orang presiden Bolivia, Gonzalo Sanchez de Lozada dan Carlos Mesa.

3. Kemunculan tokoh bangsa pribumi penantang hegemoni AS dengan politik neo-liberalismenya serta merta dicatat oleh media di dalam dan luar negeri (lihat *Newsweek*, 12 Des. 2005: 47-48; *Kompas*, 22 Des. 2005; *BBC News*, 19 Des. 2005; *Seputar Indonesia*, 21 Des. 2005; *International Herald Tribune*, 23 Jan. 2006; *Fortune*, 23 Jan. 2006: 24-25; *The Economist*, 17 Des. 2005: 35-37, 21 Jan. 2006: 42-43, 28 Jan. 2006: 38). Namun yang paling menarik perhatian pers di Indonesia, bukan perlawanannya terhadap rezim George W. Bush Jr, melainkan tekadnya untuk memangkas gaji presiden dan seluruh kabinetnya sebesar 50%, pada saat rezim SBY-MJK, yang 1 Oktober lalu justru menaikkan anggaran kepresidenan dan berbagai lembaga-lembaga pemerintahan rata-rata 40% (Kristianawati 2006; *Fajar*, 29 Des. 2005).

4. Sebelumnya, Brazil, tetangga sebelah timur laut Bolivia, negara terbesar di Amerika Selatan yang berpenduduk 135 juta jiwa, sejak Oktober 2002 dipimpin oleh Luiz

Inacio "Lula" da Silva. "Lula" (= Gurita) – yang dipanggil sebagai "abangku" oleh Evo Morales – tadinya ketua *Partido Trabalhadores* (PT), Partai Buruh Brazil yang didirikan tahun 1969. Orator berjenggot putih kelahiran tahun 1945 di kawasan Brazil Timur Laut yang miskin bermula sebagai bocah tukang semir sepatu yang kemudian menjadi buruh industri logam di Sao Paulo, dan sempat menjadi ketua serikat buruhnya. Walaupun didirikan oleh Lula dan kawan-kawan aktivis buruhnya di Sao Paulo, tapi dengan cepat PT berkembang menjadi kendaraan politik dari gerakan buruh tani, buruh industri di kota, cendekiawan dan rohaniwan. Lula sendiri aktif bermuhibah ke daerah pedesaan, termasuk ke kawasan hutan Amazon di awal 1980-an (Revkin 1990: 153).

5. Gerakan tani pendukung PT adalah *Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra* atau MST (Gerakan Pekerja Pedesaan Tak Bertanah), satu organisasi kiri yang paling keras memperjuangkan reformasi agraria di Brazil (Rotella 1997; Wolford 2005). Sebelumnya, di kawasan Amazon cabang-cabang PT sudah merangkul para petani penyadap karet (*seringalistas*), termasuk seorang tokoh penyadap karet (*seringal*), Francisco "Chico" Alves Mendes Filho, yang akrab dipanggil Chico Mendes, yang ikut mendirikan cabang PT di Acre, kampung halamannya. Kesuksesannya memimpin gerakan penyadap karet, yang berkepentingan atas pelestarian hutan Amazon, membawa Chico Mendes ke pentas internasional, lewat muhibah-muhibah bersama para aktivis lingkungan dari Dunia Ketiga ke pusat-pusat ekonomi dunia

di Britania Raya dan Amerika Serikat. Termasuk ke Washington, DC, untuk memprotes pembangunan jalan raya dan proyek-proyek lain dari pemerintah Brazil dan Bank Dunia yang merusak kelestarian hutan Amazon. Ketenaran Chico Mendes sebagai “pahlawan pembela lingkungan Amazon” ini meningkatkan kebencian dan kemarahan para *rancheiros*, pemilik-pemilik peternakan besar di kawasan Amazon kepadanya. Pada malam tanggal 22 Desember 1988, tiga hari sebelum perayaan Natal, Chico Mendes ditembak mati oleh pembunuh-pembunuh bayaran keluarga Darly Alves da Silva, tuan tanah dan raja ternak di daerah itu (Revkin 1990). Makanya, kemenangan Lula sedikit banyak mengobati kesedihan akibat kematian Chico Mendes dan banyak penyadap karet lain, serta 19 pekerja pedesaan yang dibunuh polisi militer Brazil tahun 1996 (Fauzi 2005: 34).

6.

Lula kini dikecam oleh MST karena kurang serius memperjuangkan reforma agraria dan sering berkompromi dengan para investor asing. Para aktivis petani mengeluh atas lambatnya proses reforma agrarian. Tahun 2005, popularitas Lula juga merosot karena kasus korupsi sebagian anggota parlemen dari PT, yang membeli suara dari rakyat, sehingga Lula sampai meminta maaf kepada rakyat Brazil lewat televisi (Landim 1993: 225; Fauzi 2005: 35; *BBC News*, 5 & 17 Nov. 2005). Baik Lula maupun gerakan petani tak bertanah (MST), dikecam keras oleh James Petras, sosiolog ahli Amerika Latin. Petras menunjukkan ironi yang menyedihkan, bagaimana MST tetap

setia mendukung Lula, walaupun jumlah kaum tergusur yang tinggal di tepi jalan-jalan raya, telah bertambah 40 ribu keluarga di samping 200 ribu keluarga (2005).

7.

Di Indonesia, gerakan tani hanya berhasil menjadi kekuatan nasional di masa jayanya Barisan Tani Indonesia (BTI), yang di tahun 1964 mengklaim punya antara lima dan delapan juta anggota, atau 25% dari penduduk pedesaan yang dewasa (lihat Turnquist 1984: 133; Sulisty 2000: 31; Cribb 2003: 76). Waktu itu, aksi-aksi pendudukan tanah yang melebihi ketentuan maksimal UU Land Reform 1960, yang dikenal dengan istilah ‘aksi sefihak’ atau *aksef*, sangat ditakuti oleh para tuan tanah besar. BTI juga menganjurkan pembangkangan pembayaran bagi hasil pada para pemilik tanah guntai (*absentee landlord*) dan para pemilik tanah luas (Edman 1987; Sulisty 2000: 153). Sehingga dalam kudeta berdarah tahun 1965, yang paling banyak gugur di Jawa, Bali dan Sumatera Utara adalah pimpinan dan anggota organisasi tani itu yang bernaung di bawah Partai Komunis Indonesia (PKI). Di Sumatera Utara, misalnya, sekitar 20 persen buruh perkebunan dibunuh atas perintah komandan militer waktu itu, Kemal Idris, atas perintah Soeharto (Mortimer 1972; Turnquist 1984: 234).

8.

Gerakan tani yang gagal di Indonesia dan gerakan petani yang berhasil di Brazil, ada perbedaan dan ada persamaannya. Perbedaannya adalah bahwa kehancuran BTI di Indonesia terjadi sebagai tumbak gebrakan tentara untuk mengambil alih kekuasaan. Sedangkan keberhasilan gerakan petani di Brazil terjadi setelah tentara meninggalkan pentas

politik, dan supremasi sipil telah terwujud di negara itu. Proses *abertura* di Brazil sangat berbeda ketimbang transisi pasca-Soeharto di Indonesia, di mana perjuangan ke arah supremasi sipil mengalami *set back* setelah ledakan bom Bali II, 1 Oktober lalu, di mana komando teritorial TNI/AD mengalami konsolidasi, dengan dalih melindungi rakyat dari ancaman terorisme.

9. Adapun persamaan di antara gerakan BTI di Indonesia dan MST di Brazil adalah: keduanya punya tujuan atau sasaran aksi yang sama, yakni reforma agraria. Tujuan reforma agraria adalah memperbaiki hubungan antara petani sebagai penggarap tanah dengan kekuatan-kekuatan yang mengeksploitir tanah itu untuk kepentingan akumulasi kekayaan. Kekuatan-kekuatan itu dapat berupa petani kaya, baik yang tinggal di desa maupun yang berada di luar desa (tuan tanah guntai, atau *absentee landlord*), korporasi yang bergerak di bidang agribisnis dan kehutanan, maupun perusahaan pemborong proyek-proyek infrastruktur yang sama sekali tidak menginginkan keberadaan petani setempat yang hidup dari penggarapan tanah itu atau yang hidup dari pengumpulan hasil hutan dan penggembalaan tanah itu berdasarkan hukum adat. Konflik antara petani dan kekuatan-kekuatan itulah yang tercakup di bawah istilah kolektif, “konflik-konflik agraria” atau konflik-konflik agraris.

10. Secara garis besar, sifat konflik agraris antara petani dan kekuatan-kekuatan kapitalis banyak ditentukan oleh sifat masyarakat petani yang terlibat dalam konflik-konflik

tersebut. Di Jawa, masyarakat petani yang terlibat dalam konflik-konflik itu kebanyakan merupakan *peasant society*, masyarakat petani yang belum banyak bergeser dari stratifikasi sosial sebagaimana yang ditemukan oleh BTI/PKI dalam penelitiannya, yakni (a) kelas tuan tanah; (b) petani kaya; (c) petani menengah; (d) petani gurem dan buruh tani (Mortimer 1972: 3-4). Konflik-konflik agraris yang mereka alami lebih banyak bersifat konflik kelas antara petani kecil *versus* tuan tanah besar, yang kebanyakan juga merupakan tuan tanah guntai, serta konflik dengan perkebunan sedang. Sesudah Orde Baru, mereka mulai sering berkonflik dengan Departemen PU serta PLN yang menggusur para petani untuk pembangunan proyek-proyek irigasi dan PLTA (lihat Aditjondro 2001), serta dengan Dinas Kehutanan dan badan-badan usaha milik negara di bawah Departemen Kehutanan (Bachriadi dan Lucas 2002).

11. Setelah Soeharto turun takhta, sejumlah aktivis PMII (Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia) bersama Sekretariat Bina Desa dan beberapa ornop lain berhasil mendampingi petani kawasan hutan jati di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, untuk menuntut hak mereka bertani di kawasan Perum Perhutani. Setelah serentetan perundingan yang didukung aksi massa petani, disepakati bahwa para petani kawasan hutan yang sudah terorganisasi di Kabupaten Wonosobo, diizinkan bertani di kawasan hutan jati, dengan sistem bagi hasil *fifty-fifty* (Wahono dkk 2005). Tidak jelas apakah bagi hasil itu dilakukan dengan institusi, atau

dengan perorangan pejabat Perhutani di Wonosobo.

12.

Di Sumatera Utara, masyarakat petani lebih banyak terdiri dari buruh perkebunan. Mereka lebih banyak terlibat dalam konflik-konflik dengan perusahaan-perusahaan perkebunan besar, karena menghendaki bahwa tanah-tanah perkebunan yang sudah habis masa HGU (Hak Guna Usaha)nya selama 25 tahun sejak keluarnya UU Pokok Agraria tahun 1960, dibagikan kepada para buruh taninya. Konflik-konflik itu semakin menajam sesudah Orde Baru, ketika kelapa sawit dan jenis-jenis kayu untuk hutan tanaman industri, khususnya ekaliptus, mulai digalakkan penanamannya di seantero Pulau Sumatera dan di banyak tempat di Kalimantan, untuk mendongkrak devisa ekspor Indonesia. Maka meletuslah konflik-konflik berkepanjangan antara rakyat pedesaan, yang mayoritas berprofesi sebagai petani padi, petani tanaman perkebunan, dan peramu hasil hutan, dengan korporasi-korporasi besar yang dilindungi oleh polisi, militer, serta preman. Dalam konteks itulah, gerakan sosial rakyat Porsea melawan PT Inti Indorayon Utama, yang kini berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari, merupakan gerakan tani yang telah berlangsung selama lebih dari dua dasawarsa (Down to Earth 1991; Anto dan Silitonga 2004; Silaen 2006; Wakker, de Rozario dan Sawit Watch Indonesia 2004).

13.

Seperti disinggung di atas, Kalimantan merupakan pulau di mana perkebunan kelapa sawit dan ekaliptus sudah digalakkan oleh korporasi-korporasi milik militer,

pengusaha swasta, serta kapitalis-kapitalis birokrat yang dekat dengan Istana. Seperti halnya di Sumatera, masyarakat petani di Kalimantan bervariasi antara *peasant society* yang berasal dari transmigran dari Jawa dan Madura, serta masyarakat suku (*tribal society*) atau masyarakat pribumi (*indigenous communities*), dengan sistem pertanian ladang, perkebunan dan peramu hasil hutan. Konflik agraris yang sering meletus di Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) umumnya merupakan konflik antar-komunitas, memperebutkan lahan yang sama, yang melibatkan komunitas penduduk asli (Melayu dan Dayak) *versus* komunitas migran Madura. Kedua komunitas itu memiliki pola pertanian dan etos kerja yang berbeda. Orang Madura berpola pertanian sawah dan menetap, dan sangat agresif dalam merebut kekuasaan atas wilayah usaha mereka, dengan cara legal maupun tidak. Kalau perlu, menggunakan clurit untuk menghantam lawan debat. Sedangkan orang Dayak dan orang Melayu di Kalbar (yang pada hakekatnya adalah orang Dayak yang masuk Islam) punya pola pertanian berladang, berkebun pohon buah dan pohon karet, serta meramu hasil hutan. Bertolak belakang dari stereotip tentang keagresifan orang Dayak dengan tradisi pengayauannya, orang Dayak lebih sering mengalah terhadap orang Madura. Sampai saat kesabaran mereka habis dan ruang hidup (*lebensraum*) mereka di daerah hilir sungai semakin sempit. Pada saat itulah mereka melawan, dengan mandau terhunus (lihat Alqadrie 2004; Bamba 2005).

14. Apa yang terjadi di Kalbar dan Kalteng di tahun 1999-2000, mirip kejadian di Kalbar tidak lama sesudah tentara berkuasa di awal era Orde Baru. Dari bulan Oktober s/d Desember 1967, Kodam Tanjungpura yang berkedudukan di Pontianak memobilisasi kelompok etnis Dayak untuk “menghabisi” kelompok etnis Tionghoa yang tinggal di sekitar wilayah perbatasan dengan Sarawak (Malaysia Timur) yang dianggap menjadi sarang gerilyawan PGRS/PARAKU (Pergerakan Gerilya Rakyat Sarawak/ Partai Rakyat Kalimantan Utara). Mereka kebanyakan orang Tionghoa Sarawak yang sebelumnya dilatih oleh RPKAD (sekarang, Kopassus) dalam rangka kampanye Ganyang Malaysia, melalui peristiwa “Mangkok Merah”². Alasan rekayasa politik fihak militer adalah untuk memudahkan mengendalikan penduduk keturunan Tionghoa agar tidak mendukung PGRS/PARAKU. Selama tiga bulan, sedikitnya 300 orang Tionghoa terbunuh oleh orang Dayak dan 55 ribu orang lain mengungsi ke pantai Barat, khususnya di Pontianak dan Singkawang, tanpa obat-obatan dan bahan makanan yang memadai, sehingga banyak lagi pengungsi yang meninggal dunia. Selanjutnya, bersamaan dengan semakin kukuhnya kekuasaan militer di Kalbar, penguasa Orde Baru dan kroni-kroninya mulai melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap kekayaan hutan tropis Kalbar. Undang-Undang No. 5/1967 tentang Kehutanan segera disahkan, yang memberikan legitimasi bahwa hutan adalah milik Negara. Sejak saat itulah Negara berhak memberikan HPH kepada pihak-pihak yang “dekat” dengan elit yang berkuasa. Makanya tidak kebetulan bahwa dua

orang taipan kayu yang dekat dengan keluarga Soeharto, yakni Prajogo Pangestu (Barito Pacific Group) dan Burhan Uray (Djajanti Group), berasal dari Kalbar (lihat Tirtosudarmo 2002: 347; Aditjondro 2002a: 36).

15. Seperti peristiwa tahun 1967 yang menggusur orang Tionghoa dari pedalaman Kalbar, konflik Dayak-Madura di Kalbar dan Kalteng tahun 1999-2001, menggusur orang Madura secara besar-besaran dari Kalimantan ke Jawa Timur dan Madura. Seperti dikemukakan John Bamba, Direktur Pelaksana Institut Dayakologi di Pontianak, Kalbar:

“Konflik di Sanggau Ledo dan Sambas [Kalimantan Barat], dan Sampit (Kalimantan Tengah) telah menelan korban 1.388 korban jiwa, 9.649 rumah rusak dan memaksa 167.000 orang Madura meninggalkan rumah mereka. Sejak akhir konflik Sambas pada bulan April [2001], kebanyakan orang Madura telah meninggalkan kawasan itu, demikian pula, kebanyakan telah meninggalkan Sampit di Kalimantan Tengah pada 2001” (2005: 59).

16. *Exodus* orang Madura dari Kalimantan ternyata melicinkan jalan bagi invasi perusahaan perkebunan dan pertambangan ke pulau itu. Para petani Madura meninggalkan ribuan hektar ex-kawasan hutan yang telah dibuka dan dimatangkan menjadi tanah pertanian menetap, yang menarik pertanian pisang ke Kalbar dan pisang ke Kalteng. Kelompok Medco punya rencana membuka 100 ribu hektar perkebunan kelapa sawit di Kotawaringin Barat, Kalteng, dan masih banyak lagi perkebunan kelapa sawit yang rencananya akan

dibuka di berbagai kabupaten di Kalteng dan Kalbar, sampai ke perbatasan dengan Sarawak, Malaysia Timur, dengan melibatkan kelompok-kelompok perkebunan besar, seperti Astra Agro Lestari. Belum lagi pertambangan batubara, bijih besi, dan emas. Tidak hanya melibatkan korporasi nasional, tapi juga korporasi asing, seperti kelompok BHP Billiton, yang mendapat konsesi batubara di kawasan hutan lindung. Masuknya perusahaan bermodal Australia itu difasilitasi oleh seorang bekas Gubernur Kalteng serta seorang bupati di daerah itu. Kedua-duanya tokoh Dayak asli (Marut 2003; kom. pribadi dengan sumber-sumber di Jakarta dan Palangkaraya, 2005-2006). Dengan demikian, pencetusan, atau pemeliharaan dan eskalasi konflik komunal di antara berbagai komunitas petani dengan pola pertanian yang berbeda, dapat dilihat sebagai strategi ekspansi modal ke- dan di daerah-daerah konflik.

17. Modal tidak bergerak sendiri. Karena ada kaitan dengan pencetusan dan pelanggaran konflik antar komunitas, aparat bersenjata – polisi, khususnya Brimob, militer, dan kelompok-kelompok milisi – ikut memfasilitasi ekspansi korporasi-korporasi besar untuk merebut penguasaan sumber daya alam setempat dari tangan penduduk setempat, atau memperkenalkan komoditi baru yang lebih laku di pasaran dunia. Dalam kasus Sampit, seorang anggota Kopassus yang berasal dari Kalteng dan pernah termasuk tim *counter-insurgency* di bawah komando Mayjen Prabowo Subianto, sudah berada di sana untuk mengumpulkan kepala adat Dayak dari tujuh hulu sungai, sebulan sebelum meletusnya konflik

Sampit, bulan Februari 2001. Dalihnya adalah mempersiapkan masyarakat setempat untuk mengantisipasi merembetnya konflik Sambas dari Kalbar ke Kalteng.

18.

Tahu-tahu, satu konflik antara orang Dayak dan orang Madura di kota Sampit, di mana seorang Dayak menjadi korban clurit orang Madura, serta merta direspons dengan perlawanan besar-besaran dan seolah-olah spontan oleh orang Dayak terhadap orang Madura, tanpa dicegah oleh aparat keamanan yang bertugas di sana. Anggota Kopassus tadi serta seorang kolonel juga datang ke Kalteng, pasca kerusuhan tersebut. Pembantaian dan pengusiran orang Madura dari Kalteng segera disusul dengan munculnya kelompok-kelompok milisi pemuda Dayak, konon untuk menjaga keamanan di kampung-kampung Dayak dari kembalinya preman-preman Madura. Kehadiran kelompok-kelompok paramiliter Dayak, yang populer dengan sebutan *passus* itu dibiarkan oleh aparat keamanan resmi di Kalteng. Kelompok-kelompok *passus* itu kini direkrut menjadi 'PAM Swakarsa' di perkebunan-perkebunan pertambangan dan kehutanan (kom. pribadi dengan sumber-sumber di Jakarta dan Palangkaraya, 2005-2006). Dengan demikian, kita bisa berbicara tentang kolusi antara modal, militer dan paramiliter, sebagai pembuka jalan bagi ekspansi korporasi-korporasi besar.

19.

Seperti halnya di Kalimantan, konflik Ambon dan Poso juga disusul dengan ekspansi korporasi-korporasi besar di kedua daerah itu. Di Kepulauan Maluku, konflik antar komunitas di Halmahera dan

Haruku disusul dengan masuknya atau ekspansi maskapai-maskapai pertambangan bermodal asing, yakni Newcrest yang bermodal Australia di Teluk Kao, Halmahera, dan Ingold yang bermodal Kanada, di Pulau Haruku (Aditjondro 2004a: 53-4). Sedangkan di Sulteng, konflik Poso memuluskan jalan bagi masuknya tiga korporasi domestik yang dekat dengan partai penguasa, yakni kelompok Medco milik keluarga Arifin Panigoro; kelompok Artha Graha, perusahaan kongsi antara Yayasan Kartika Eka Paksi milik TNI/Angkatan Darat dengan dua pengusaha keturunan Tionghoa, Tomy Winata dan Sugianto Kusuma; serta kelompok Hadji Kalla, Bukaka dan Bosowa milik keluarga Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (Aditjondro 2004a: 54-5; Aditjondro 2005).

20.

Seiring dengan konflik agraris yang bercorak komunal, yang lazim disebut “konflik horizontal”, “konflik vertikal” antara masyarakat adat atau “bangsa-bangsa pribumi” melawan korporasi-korporasi yang menyerobot hak-hak ulayat orang Dayak di pedalaman, dengan dukungan aparat keamanan, juga terus terjadi. Itu lebih sering terjadi di Kalimantan Timur (Kaltim), di lokasi HPH, HTI dan HGU milik korporasi-korporasi yang bergerak dalam bisnis kayu lapis, pulp, dan kelapa sawit, di bawah payung konglomerat milik kroni-kroni Soeharto seperti Bob Hasan, dan lain-lain. Namun sesungguhnya, konflik-konflik serupa juga terjadi di Kalteng dan Kalbar, walaupun tidak spektakuler seperti konflik-konflik masyarakat adat *versus* HPH di Kaltim (Rini 2005).

21.

Berbagai jenis konflik agraris itu, merupakan pupuk penyubur pertumbuhan gerakan petani di Indonesia. Di Jawa, berbagai serikat tani yang muncul ke permukaan sesudah Soeharto dipaksa turun dari takhtanya, terutama berjuang untuk menghidupkan kembali program *land reform* yang macet selama masa kediktatoran Soeharto. Termasuk *land reform* tanah Kehutanan (Bachriadi & Lucas 2002). Di Sumatera Utara, fokus berbagai gerakan tani adalah memperjuangkan pengembalian tanah rakyat suku Melayu yang telah diambil alih oleh berbagai Perseroan Terbatas Perkebunan Negara (PTPN) (Agustono 2002).

22.

Dilihat dari sasaran yang hendak dicapai oleh berbagai aksi petani itu, aksi-aksi petani itu dapat dibedakan berdasarkan jenis konflik agrarisnya, yang dapat dibedakan antara konflik yang bersifat restoratif dan konflik yang bersifat reformatif atau transformatif. Aksi petani yang bersifat restoratif adalah “di mana para aktor dari kalangan tani berusaha merebut kembali hak-hak tanah serta hak-hak atas sumber daya alam yang hilang atau terancam hilang. Hak-hak tanah itu berkisar dari hak milik, hak menguasai tanah, sampai dengan hak memanen sumber daya alam di ekosistem-ekosistem tertentu. Hak-hak itu dapat hilang karena dirampas oleh negara, oleh kelompok masyarakat lain, atau oleh perusahaan-perusahaan bermodal besar” (lihat Aditjondro 2002b: 293).

23.

Berbeda dari konflik yang bersifat restoratif adalah konflik tanah yang bersifat transformatif, di mana para aktor utama yang terlibat dalam

konflik itu memperjuangkan hak-hak yang dulu belum mereka miliki. Misalnya, hak memiliki tanah, hak untuk menggarap bidang-bidang tanah tertentu, atau hak untuk mengumpulkan hasil bumi dari tanah itu, misalnya hak untuk mengumpulkan rotan dan hasil hutan ikutan lain. Transformasi itu dapat bersifat 'politis', di mana para petani tak bertanah memperjuangkan hak untuk memiliki atau menguasai sebidang tanah atau alat produksi lain, tetapi dapat juga bersifat 'kultural', di mana ketentuan pengelolaan sumber daya alam tertentu berdasarkan hukum adat yang lama ditafsirkan kembali dan direkonstruksi (Aditjondro 2002b: 293).

24. Berbagai jenis konflik dan aksi agraris itu, dapat kita lihat terjadi pula di Sulawesi Tengah (Sulteng). Ada konflik agraris yang lebih bersifat pertentangan kelas, walaupun terbungkus dalam konflik SARA (suku, agama, ras, antar golongan). Ada konflik agraris antara masyarakat petani dan Taman Nasional Lore Lindu tentang hak bertani dan mengumpul hasil hutan di wilayah Taman Nasional itu. Lalu ada konflik agraris antara masyarakat desa melawan korporasi-korporasi besar di bidang perkebunan kelapa sawit, HPH, pertambangan nikel (Sangaji 2002), pertambangan migas (minyak bumi dan gas alam) (Gogali t.t.), dan lain-lain. Juga ada konflik agraris antara masyarakat desa dan pembangunan proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) (Sangaji 2000 dan Aditjondro 2005).

25. Sejarah perlawanan rakyat pedesaan Sulteng terhadap kebijakan pemerintah yang memihak investor,

dimulai dengan perlawanan rakyat di dataran Seseba seluas 400 hektar di Kabupaten Banggai, menghadapi gelombang-gelombang penggusuran mereka oleh berbagai perusahaan yang datang ke dataran itu. Masyarakat Seseba sejak dulu mengenal klasifikasi lahan dataran itu sesuai dengan fungsinya masing-masing, yakni *hutan rakyat* yang dimiliki secara komunal; *tanah adat*, yang difungsikan masyarakat untuk menanam palawija (milik komunal, di mana warga masyarakat secara bergantian menanam dan memanen hasil) dan tanaman tahunan (milik perorangan); serta *perkebunan masyarakat* yang digunakan warga masyarakat untuk menanam tanaman tahunan dalam skala besar, seperti kelapa, coklat, kemiri, dan kopi.

26. Sejak 1982, rakyat Seseba silih berganti 'dirayu' dan diancam untuk menyerahkan lahannya oleh PT Delta Subur Permai, dengan melibatkan militer dari Koramil Batui, serta dengan mengeksploitasi wibawa tradisional Raja Banggai, Hideo Amir. Rakyat Seseba tetap melawan dengan merebut kembali tanah mereka dan menanaminya dengan padi ladang dan palawija. Perlawanan mereka diorganisir oleh Forum Persaudaraan Petani Miskin, yang lima pimpinannya sempat dihukum penjara di tahun 2003 selama lima bulan. Sedikitnya sampai pertengahan 2004 rakyat Seseba terus melawan, walaupun tekanan semakin berat. Tampaknya, daerah mereka diincar oleh kelompok Medco yang sedang melakukan eksplorasi minyak bumi di daratan dan lepas pantai Banggai, untuk dijadikan pusat pemukiman kayawan PT Medco E & P Tomori

Sulawesi (d/h PT Exspan Tomori Sulawesi), anak perusahaan kelompok Medco. Selain itu, lokasi Seseba juga relatif dekat dengan rencana pelabuhan Pertamina dan rencana pelabuhan samudera untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Batui (Gogali t.t.).

27.

Perlawanan rakyat Seseba, segera disusul perlawanan rakyat desa di daerah Bungku (dulu di Kabupaten Poso, kini masuk Kabupaten Morowali), menghadapi PT Tamaco Graha Krida, yang mendapat konsesi kelapa sawit seluas 13.230 hektar, sehingga 1743 orang petani kehilangan lahan. Mereka kemudian mengorganisasi diri menjadi Forum Petani Plasma Kelapa Sawit. Tahun 1999, sebanyak 5000 orang anggota Forum itu mendatangi kantor pusat perusahaan perkebunan tersebut. Mereka memprotes kebijakan perusahaan dalam pembagian lokasi plasma, memprotes luas Lahan Inti Plasma yang melebihi 40% dari luas plasma, serta memprotes perusahaan yang memprioritaskan transmigran dari NTT, NTB dan Jawa. Aksi anggota Forum itu dibalas dengan demo tandingan oleh para petani transmigran peserta plasma, yang diorganisasi oleh perusahaan dan pemerintah setempat. Aksi massa para anggota Forum itu dilanjutkan dengan aksi massa besar di Poso, ibukota Kabupaten Poso yang waktu itu masih meliputi Kabupaten Morowali. Akibat demo besar tersebut, ketua Forum, Guntur Lemangga, diteror melalui telepon oleh orang tak dikenal. Teror telpon ini diadakan oleh Guntur kepada Dirjen Perkebunan dan Komisi HAM (Gogali t.t.).

28.

Berbagai aksi petani itu, yang bergema sampai ke kota Palu saat delegasi-delegasi petani ke DPRD Provinsi Sulteng, ikut meradikalisasi gerakan mahasiswa yang berbasis di Universitas Tadulako dan STAIN. Sebelumnya, gerakan mahasiswa di Palu sudah turun ke jalan di era kediktatoran Soeharto, untuk membela kepentingan rakyat seputar Danau Lindu, yang menolak pembendungan danau mereka (lihat Sangaji 2000). Dialektika antara gerakan kampus dan gerakan kampung itu mendorong proses radikalisasi berbagai komponen gerakan pro-demokrasi di Sulawesi Tengah, yang semula terhimpun dalam Forum Rakyat Miskin Sulawesi Tengah (FRM-ST) dan kini sudah menjelma menjadi Persatuan Rakyat Miskin Sulawesi Tengah (PRM-ST).

29.

Mendahului terbentuknya FRM-ST, di akhir 1990-an telah muncul embrio gerakan tani yang cukup militan di Sulteng, yang tergabung dalam Serikat Tani Nasional (STN) wilayah Sulteng. Kebetulan, kader-kader STN di Desa-Desa Sepe, Silanca dan Tongko di Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, sedang menyiapkan perlawanan terhadap PT Inhutani, berupa pendudukan kembali (*reclaiming*) tanah mereka, yang telah diduduki perusahaan kehutanan negara itu untuk kebun pembibitan kayu hitam (*ebony*). Bermodal militansi kader-kader STN di wilayah ini, ornop tani ini menyelenggarakan konferensi tani se-Sulteng di Palu, tanggal 28 s/d 30 November 1999, yang diikuti 14 orang dari Kabupaten Poso, 14 orang dari Kabupaten Buol-Toli-Toli, dan sembilan orang dari Kabupaten Donggala. Selain meresmikan berdirinya STN Cabang Poso dan Anak Cabang Sindue, dalam

konferensi itu para peserta peserta bersepakat mendeklarasikan berdirinya STN Wilayah Sulteng di gedung DPRD Tingkat I Sulteng (Aditjondro 2002b: 405-6).

30. Deklarasi yang dibacakan oleh seorang petani dari Desa Betania di Kabupaten Poso itu berisi enam tuntutan: Pertama, menuntut kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus-kasus tanah yang ada, baik konflik antara petani dengan pemerintah, petani dengan pemilik modal, serta kasus-kasus tanah yang lain. Kedua, menuntut penyelesaian kasus-kasus Kredit Usaha Tani (KUT) yang ada di wilayah Sulteng. Ketiga, menuntut penghentian praktek-praktek militerisme dalam penyelesaian konflik-konflik tanah, untuk itu STN Wilayah Sulteng menyerukan pencabutan dwifungsi TNI. Keempat, menuntut penurunan harga sarana produksi pertanian (sarprotan), kenaikan harga produk pertanian dan kenaikan upah buruh. Kelima, menuntut pengusutan praktek-praktek korupsi-kolusi-dan nepotisme di dalam tubuh pemerintah. Dan keenam, menuntut pembangunan sarana penunjang untuk penguatan ekonomi petani di pedesaan (Aditjondro 2002b: 406).

31. Tuntutan-tuntutan itu cukup radikal, khususnya tuntutan No. 3 yang menukik ke tuntutan pencabutan dwifungsi TNI. Namun tuntutan No. 2, yakni penyelesaian kasus-kasus manipulasi KUT, juga cukup aktual waktu itu, mengingat bahwa beberapa orang tokoh pencetus kerusuhan Poso 'jilid 2' yang dimulai tanggal 16 April 2000, sedang diusut karena keterlibatannya dalam penyalahgunaan dana KUT.

Waktu itu, Agfar Patanga, adik dari sang Bupati, sedang diadili karena terlibat dalam pembuatan selebaran yang provokatif.³ Makanya, pembiaran terhadap eskalasi konflik komunal di Kabupaten Poso, dapat dilihat sebagai respons militer terhadap tuntutan STN Wilayah Sulteng untuk penghapusan dwifungsi TNI dan pengusutan penyalahgunaan dana KUT. Yang jelas, gelombang demi gelombang kerusuhan dan pengungsian telah menghancurkan jaringan organisasi STN di Kabupaten Poso. Sementara rencana *reclaiming* tanah penduduk ketiga desa di Kecamatan Lage yang telah diduduki oleh Perum Perhutani, belum pernah terwujud (Aditjondro 2002b: 406-7; Aditjondro 2003: xxxiii).

32. Belakangan ini, di desa-desa di Kecamatan Biromaru, Kabupaten Donggala, Sulteng, semakin sering tercetus konflik berdarah antara orang Bugis dan kedua suku asli Kabupaten Donggala, yakni orang Kaili Ledo yang menghuni dataran rendah dan orang Kaili Da'a yang habitat aslinya berada di pegunungan. Untuk mengurangi tekanan penduduk di daerah pegunungan, banyak orang Kaili Da'a dimukimkan kembali oleh Pemerintah Daerah ke dataran rendah untuk menggarap tanah pertanian di sana. Namun kedua suku asli Kabupaten Donggala itu sangat berat menghadapi persaingan dengan para migran Bugis, yang lebih tinggi tingkat kewiraswastaannya dan dengan cepat telah memperoleh sertifikat buat tanah persawahan dan perkebunan di dataran rendah. Sementara itu, orang Kaili Da'a dengan sistem hak adat mereka yang

bersifat kolektif, tidak terbiasa mengurus sertifikat tanah. Begitu pula orang Kaili Ledo, yang merasa “tuan tanah” secara adat di dataran rendah. Akibat kesenjangan ekonomi dan perbedaan persepsi tentang pemilikan tanah di sana, sering terjadi apa yang dianggap oleh petani Bugis sebagai “pencurian” tanaman mereka. Reaksi mereka paling keras, misalnya dengan membunuh para “pencuri”, apabila yang “dicuri” adalah tanaman coklat, komoditi primadona di Sulawesi Tengah. Di bulan Oktober 2004, terjadi dua kali pembunuhan di Kecamatan Biromaru, yakni di Desa Jono-oge dan di desa Sidondo, yang diduga berlatarbelakang konflik agraris begini, yakni awal Oktober dan tanggal 31 Oktober (Aditjondro 2004b).

33.

Mudah-mudahan para aktivis petani dan pendamping petani di Sulteng dapat memetik pelajaran dari sejarah konflik agraria dan gerakan petani di Indonesia, baik di Sulteng maupun jauh di Amerika Latin, anak benua yang telah menyaksikan kebangkitan gerakan kiri ke tampuk pemerintahan di mayoritas negara di sana. Melihat keragaman konflik agraria yang tengah dihadapi oleh kelompok-kelompok tani di berbagai pelosok Sulteng, barangkali suatu jaringan organisasi tani yang bersifat federatif, di mana setiap kelompok dapat melakukan aksi secara otonom, tanpa harus menunggu instruksi dari pengurus pusat atau pengurus wilayah yang berkedudukan di Palu. Namun itu tidak berarti, solidaritas dan dukungan lintas lokasi tidak diperlukan. Mungkin suatu sekretariat bersama dapat menjalankan fungsi penopang aksi-

34.

aksi lokal, sekaligus melakukan advokasi pendukung aksi-aksi lokal di tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional.

Sekretariat bersama itu perlu dilengkapi dengan suatu pusat data yang punya perhatian yang representatif bagi semua kelompok aksi petani di seluruh provinsi Sulteng. Selain representatif secara geografis, juga representatif dalam variasi konflik agraris yang sudah atau akan terjadi. Berarti, selain aksi-aksi yang bercorak “konflik vertikal”, aksi-aksi memecahkan “konflik-konflik horizontal” juga perlu didukung, sebab konflik demikian seringkali berakar pada konflik kelas antara berbagai komunitas petani. Juga, perhatian yang seimbang diperlukan bagi aksi-aksi petani yang bersifat “restoratif” atau “defensif”, dengan aksi-aksi petani yang bersifat reformatif atau transformatif (lihat Butir 22 dan 23).

35.

Satu hal yang juga harus difikirkan adalah bagaimana gerakan tani di Sulteng bersinergi dengan gerakan-gerakan kemasyarakatan (*social movements*) lain yang berlingkup nasional, bahkan internasional, khususnya gerakan lingkungan, gerakan masyarakat adat atau ‘bangsa-bangsa pribumi’ (*indigenous peoples’ movement*), serta gerakan advokasi pertambangan. Makanya sebaiknya sekretariat bersama gerakan tani Sulteng, memelihara hubungan yang mesra dengan simpul-simpul gerakan lingkungan nasional yang didampingi WALHI, gerakan masyarakat adat yang didampingi AMAN, dan gerakan advokasi pertambangan yang didampingi oleh JATAM.

36.

Last but not least, di samping menjadi “palang merah” bagi korban-korban pembangunan, gerakan tani di Sulteng perlu menjadi “palang pintu” untuk mencegah jatuhnya korban-korban baru. Termasuk di sini, memikirkan cara-cara bertani yang tidak tergantung pada produk pabrik, seperti pupuk sintetis dan pestisida sintetis, dan mempertahankan, sekaligus mengembangkan bentuk-bentuk pertanian komunal dan kolektif, dengan menggali hikmah dari cara-cara bertani tradisional yang perlu diteliti dan dikembangkan secara ilmiah. Misalnya, integrasi antara pertanian dan peternakan kerbau di ketiga lembah Lore, Bada, Besoa dan Napu, yang kini terancam hilang setelah tokoh-tokoh masyarakatnya sendiri lebih tertarik menjual kawanan kerbaunya dan membeli traktor kecil yang tergantung pada BBM yang kini makin mahal dan membuat petani semakin tergantung pada Negara dengan bisnis BBM dan industri petrokimianya.

Jakarta, 22-23 Februari 2006.

Referensi:

Aditjondro, George Junus (2001). Go with the Flow: The Fluctuating and Meandering Nature of Indonesia's Anti-Large Dam Movement. Makalah untuk Lokakarya dalam rangka Jubileum KITLV dengan tema "Air sebagai Pemberi Kehidupan dan Kekuatan Yang Mematikan serta Hubungannya dengan Negara, Dulu dan Sekarang" di Leiden, Negeri Belanda.

————— (2002a). "Suharto has Gone, but the Regime has not Changed: Presidential Corruption in the *Orde Baru*." Dalam Richard Holloway (peny.). Stealing from the People: 16 Studies on Corruption in Indonesia. Book 1. Jakarta: Aksara Foundation, hal. 1-65.

————— (2002b). "Aksi Petani, Represi Militer, dan Sosialisme Marga: Memperluas Wacana Permasalahan Tanah di Indonesia". Epilog dalam Anu Lounela dan R. Yando Zakaria (peny.). Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung. Yogyakarta: INSIST Press, hal. 391-411.

————— (2003). "Renungan buat Papa Nanda, Anak Domba Paskah dari Tentena". Prolog dalam Rinaldy Damanik, Tragedi Kemanusiaan Poso: Menggapai Surya Pagi melalui Kegelapan Malam. Jakarta & Yogyakarta: PBHI, Yakoma PGI & CD Bethesda, hal. Xviii-iii.

————— (2004a). "Tigabelas Tesis tentang Kerusuhan dan Konflik Sosial Pasca-Soeharto di Indonesia." Dalam Dicky Mailoa, Jeirry Sumampouw dan Teddy Weohau (peny.). Gereja-Gereja Menggumuli Konflik dan Kekerasan dalam Era Transisi menuju Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Crisis Center PGI, hal. 46-60.

————— (2004b). Bergerilya di tengah-tengah Kawanannya Serigala: Tantangan bagi Gerakan Pro-Demokrasi di Indonesia. Makalah di depan Pemuda Gereja GPID di Jono-oge, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah.

————— (2005). Setelah Gemuruh Wera Sulewana Dibungkam: Dampak Pembangunan PLTA Poso & Jaringan SUTET di Sulawesi. Kertas Posisi Yayasan Tanah Merdeka, Palu.

Agustono, Budi (2002). "Orang Melayu *versus* Pendatang, Sengketa Tanah di Sumatera Utara". Dalam Lounela dan Zakaria, *op. cit.*, hal. 159-84.

Alqadrie, Syarif Ibrahim (2004). "Pola Pertikaian di Kalimantan dan Faktor-Faktor Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik yang Mempengaruhi Mereka". Dalam Lambang Trijono dkk (peny.). Potret Retak Nusantara: Studi Kasus Konflik di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada, hal. 171-234.

Anto, J. & Benget Silitonga (2004). Menolak Menjadi Miskin: Gerakan Rakyat Porsea Melawan Konspirasi Gurita Indorayon. Medan: BAKUMSU (Lembaga Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara).

Bachriadi, Dianto dan Anton Lucas (2002). "Hutan Milik Siapa? Upaya-upaya Mewujudkan *Forestry Land Reform* di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah". Dalam Lounela dan Zakaria, *op. cit.* , hal. 79-158.

Bamba, John (2005). "Kalimantan: Kesatuan atau Keragaman?" dalam Irfan Abubakar dan Chaider S. Bamualim (peny.). Transisi Politik dan Konflik Kekerasan: Meretas Jalan Perdamaian di Indonesia, Timor Timur, Filipina dan Papua New Guinea. Jakarta & Utrecht: Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah & European Centre for Conflict Prevention (ECCP), hal. 53-78.

Cribb, Robert (peny.). The Indonesian Killings: Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966. Yogyakarta: Matabangsa & Syarikat Indonesia.

Down to Earth (1991). Pulping the Rainforest: The Rise of Indonesia's Paper and Pulp Industry. London: Down to Earth, International Campaign for Ecological Justice in Indonesia.

Edman, Peter (1987). "Communism a la Aidit": The Indonesian Communist Party under D.N. Aidit, 1950-1965. Townsville: Centre for Southeast Asian Studies, James Cook University of North Queensland.

Fuentes, Marta & Andre Gunder Frank (1989). "Ten Theses on Social Movements," *World Development*, No. 12/Vol. 17, hal. 179-91.

Gogali, Nerlian (t.t.). Marmer, Migas, dan Militer di Ketiak Sulawesi Timur: Antara Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Investor. Naskah yang belum diterbitkan.

Kristianawati, Ari (2006). "Membandingkan Evo Morales dengan Pemerintahan SBY-JK", *Sinar Harapan*, 12 Januari.

Landim, Leilah (1993). "Brazilian Crossroads: People's Groups, Walls and Bridges." Dalam Ponna Wignaraja (peny.). New Social Movements in the South: Empowering the People. London: Zed Books, hal. 218-29.

Marut, Donatus K. (2003). Globalization and Conflicts among the Poor in Indonesia. Ceramah umum dalam Konferensi Partai Kiri-Hijau di Groningen, Negeri Belanda, tanggal 25 Oktober.

Mortimer, Rex (1972). The Indonesian Communist Party and Land Reform 1959-1965. Melbourne: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University.

Petras, James (2005). "Lula's "Workers' Regime" Plummets in Stew of Corruption," *Counterpunch*, 30 Juli.

Revkin, Andrew (1990). The Burning Season: The Murder of Chico Mendes and the Fight for the Amazon Rain Forest. London: Collins.

Rini, Kartika (2005). Tempun Petak Nana Sare : Kisah Dayak Kadori, Komunitas Peladang di Pinggiran. Yogyakarta: INSIST Press.

Rotella, Sebastian (1997). "Brazil's Machete-and-Sickle Movement," *Sydney Morning Herald*, 19 April.

Sangaji, Arianto (2000). PLTA Lore Lindu: Orang Lindu Menolak Pindah. Yogyakarta & Palu: Pustaka Pelajar, bekerjasama dengan Yayasan Tanah Merdeka & WALHI Sulawesi Tengah.

————— (2002). Buruk Inco, Rakyat Digusur: Ekonomi Politik Pertambangan Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sardar, Ziauddin & Borin Van Loon (1999). Introducing Cultural Studies. Cambridge: Icon Books.

Silaen, Victor (2006). Gerakan Sosial Baru di Toba Samosir: Studi Kasus Gerakan Perlawanan Rakyat Terhadap Indorayon. Yogyakarta: IRE Press.

Sulistyo, Hermawan (2000). Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal Yang Terlupakan (1965-1966). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Tirtosudarmo, Riwanto (2002). "Migrasi dan Konflik Etnis: Belajar dari Konflik di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah". *Analisa CSIS*, No. 3/Tahun 31, hal. 340-52.

Turnquist, Olle (1984). Dilemmas of Third World Communism: The Destruction of the PKI in Indonesia. London: Zed Books.

Wahono, Francis, Anu Lounela, Ion Subagyo, Agustinus Alibatha (2005). Indonesia's Peasant Movement. Laporan untuk studi Asian Social Movements yang sedang diselenggarakan oleh INSIST, Yogyakarta.

Wakker, Eric, Joanna de Rozario dan Sawit Watch Indonesia (2004). Licinnya Minyak Sawit: Dampak Pengembangan Perkebunan Besar Kelapa Sawit terhadap Aspek Sosial dan Ekologi di Asia Tenggara. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).